

Analisa Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pelaksana pada Program Keluarga Harapan Kecamatan Tapan Dolok)

Nurhasanah¹, Muhammad Arief², Liza Novietta³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Harapan Medan, Program Studi Akuntansi

Email: Nuhasanahnur20@gmail.com

Abstract

This research aims to analyze the influence of accounting information systems on the distribution of the Program Keluarga Harapan (PKH) in Kecamatan Tapan Dolok and evaluate efforts to enhance accountability by using the DTKS (Integrated Social Welfare Data), SIKS-NG (Social Welfare Information System-Next Generation) applications and PKH e-sdm application. The research methodology employed a qualitative approach involving 2 PKH facilitators, 1 District Officer, and 100 Beneficiary Families (KPM), utilizing in-depth interviews, documentation, and direct observation during the fund distribution process. The results showed that the utilization of the DTKS, SIKS-NG, and e-SDM PKH applications assists PKH facilitators in monitoring the distribution of PKH funds. However, the SIKS-NG application has limitations as it can only be accessed by PKH facilitators, restricting access to other parties. Nevertheless, the distribution of funds to the beneficiary families aligns closely with the PKH subcategories.

Keywords: *Accounting Information System, Family Hope Program, Accountability*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi terhadap penyaluran dana Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tapan Dolok dan mengevaluasi upaya peningkatan akuntabilitas dengan menggunakan aplikasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation) dan aplikasi e-SDM PKH. Metodologi penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif yang melibatkan 2 Pendamping PKH, 1 orang Pegawai Kecamatan, dan 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung selama proses penyaluran dana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi DTKS, SIKS-NG dan aplikasi e-SDM PKH membantu para Pendamping PKH untuk mengontrol penyaluran dana PKH. Namun aplikasi SIKS-NG memiliki kekurangan yang hanya dapat diakses oleh Pendamping PKH, sehingga pihak lain tidak dapat mengakses aplikasi tersebut. Namun, penyaluran dana kepada keluarga penerima manfaat menurut subkategori PKH hampir tepat sasaran.

Kata kunci: *Sistem Informasi Akuntansi, Program Keluarga Harapan, Akuntabilitas*

PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan atau yang disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah *Conditional Cash Transfers* (CCT) ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah

kemiskinan kronis. Sebagai sebuah program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses keluarga miskin terutama ibu hamil, anak dan para lansia untuk memanfaatkan berbagai Fasilitas Layanan Kesehatan (Faskes), Fasilitas Layanan Pendidikan (Fasdik) dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial (Fassos) yang tersedia di sekitar mereka. Melalui Program Keluarga Harapan, Keluarga Penerima Manfaat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai perlindungan sosial lainnya yang merupakan komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi episentrum dan *center of excellence* penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional (KemensosRI, 2020).

Analisis Sistem Informasi Akuntansi Penyaluran Dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) Di Tapian Dolok, yang mengkaji tentang sistem informasi akuntansi mengenai keefektifan dalam penyaluran dana secara relevan demi menunjang tujuan program pemerintah agar tercapai serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian terdahulu ini menyatakan rata-rata sistem penyaluran dana sudah sesuai dengan aturan tetapi masih ada beberapa kendala yakni pada pertanggungjawaban dirasa masih kurang karena dokumen slip bukti penarikan tidak tersimpan dan pada laporan keuangan tidak dilakukan secara terpisah yang sesuai dengan kegiatannya.

Penelitian ini dilaksanakan untuk memperoleh gambaran mengenai sistem informasi akuntansi penyaluran dana PKH di Kecamatan Tapian Dolok. Jika sistem informasi penyaluran dana dilakukan secara efektif dan efisien maka dapat mewujudkan sistem penyaluran dana yang tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas program penyaluran bantuan sosial dalam pengelolaan dan ademi mencapai tujuan program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang pada akhirnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, yaitu proses dan makna (Perspektif subjek) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Agar peneliti fokus di lapangan sehingga hasil penelitian yang didapat sesuai dengan fakta di lapangan maka penelitian ini berlandaskan teori yaitu dapat menggambarkan latar belakang penelitian sehingga hasil penelitiannya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti yang kemudian dapat ditarik kesimpulan mengenai sistem informasi akuntansi penyaluran dana Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tapian Dolok. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Tapian Dolok yang berada di Jl. Besar Pematang Siantar – Tebing Tinggi Km 10 Sinaksak Kabupaten Simalungun.

Penelitian dilaksanakan dari bulan Juli 2022 hingga selesai. Sumber data penulis dalam penulisan laporan ini yaitu studi pustaka, pada tahap ini penulis mencari dan mengumpulkan data dengan cara membaca sumber pustaka seperti buku, undang-undang dan sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan teori yang disesuaikan dengan judul laporan. Teknik pengumpulan data ini menggunakan metode dokumentasi, data wawancara dan metode pengamatan pengumpulan data dan pencarian data dengan cara langsung maupun tidak langsung. Dikelola dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori yang diproses dengan cara mencari dan menyusun secara sistematis kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penelitian melalui hasil wawancara yang dilakukan pada 100 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH, 2 Pendamping PKH dan 1 orang Pegawai Kecamatan Tapian Dolok dapat di peroleh data sesuai dengan jenis kelamin Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Keluarga Penerima Manfaat Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	21	21%
Perempuan	79	79%
Jumlah	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, diperoleh hasil penelitian menurut jenis kelamin perempuan 79%, sedangkan jenis kelamin laki-laki 21%. Hal ini menunjukkan bahwasannya Program Keluarga Harapan memang didominasi oleh peserta jenis kelamin perempuan. Karena kebijakan Kementerian Sosial pada awalnya mengharuskan pengurus penerima bantuan PKH adalah perempuan yang sudah dewasa didalam satu Kartu Keluarga (KK)/ istri atau anak perempuan dewasa yang sudah memiliki KTP. Pemerintah mempercayai bahwa yang mampu mengurus keuangan dengan baik adalah seorang wanita. Namun sejak tahun 2021 acuan penerima PKH adalah data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) yang terbaru, dimana data DTKS sudah berisikan data seluruh keluarga baik kepala keluarga, istri dan anggota keluarga. Lalu disesuaikan dengan kategori penerima bantuan PKH, yang salah satunya kategori Kesejahteraan Sosial, meliputi Lansia dan Disabilitas. Dimana lansia tunggal ataupun penderita disabilitas juga terdapat seorang laki-laki. Oleh karena itu, hasil penelitian berdasarkan jenis kelamin juga terdapat jenis kelamin laki-laki.

Usia merupakan salah satu faktor untuk menentukan klasifikasi penerima bantuan PKH. Karena pada Program Keluarga Harapan memiliki tiga komponen bantuan yaitu FasDik (Fasilitas Pendidikan) yang diperuntukkan oleh keluarga yang memiliki memiliki komponen anak sekolah, mulai dari Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK). FasKes (Fasilitas Kesehatan), dimana fasilitas ini diperuntukkan bagi wanita yang sedang hamil/nifas, ibu yang menyusui dan anak usia dini. Yang terakhir ada FasKes (Fasilitas Kesejahteraan Sosial), bantuan ini diperuntukkan bagi keluarga yang memiliki komponen lansia ataupun penyandang disabilitas. Meski demikian, Kementerian Sosial (Kemensos) membatasi bantuan PKH jika dalam suatu keluarga terdapat ibu hamil, pelajar, lansia atau disabilitas. Penghitungan bantuan sosial PKH dibatasi maksimal empat orang dalam satu keluarga. Pembatasan penghitungan ini juga tercantum dalam Surat Keputusan Direktur Jaminan Sosial Keluarga tentang Indeks Bantuan Sosial. Adapun karakteristik penerima bantuan Program Keluarga Harapan berdasarkan usia dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2. Klasifikasi Penerima Bantuan PKH Berdasarkan Usia

Umur	Jumlah	Persentase
25-35 tahun	14	14%
36-45 tahun	22	22%
46-55 tahun	29	29%
>56 tahun	35	35%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas, peserta penerima bantuan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Tapian Dolok berusia antara 25-35 tahun, yaitu sebesar 14% (14 orang). Sedangkan, peserta penerima bantuan PKH yang berusia 36-45 tahun yaitu sebesar 22% (22 orang). Peserta penerima bantuan PKH yang berusia 46-56 tahun adalah 29% (29 orang) dan peserta penerima bantuan PKH yang berusia lebih dari 56 tahun yaitu sebesar 35% (35 orang).

Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan bukan merupakan salah satu syarat untuk menjadi peserta penerima bantuan sosial PKH. Salah satu tujuan dari dibentuknya Program Keluarga Harapan ini adalah untuk mensejahterahkan masyarakat. Sehingga rentang pendidikan rata-rata untuk para peserta penerima bantuan PKH yaitu dimulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan maksimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Apabila ada peserta yang memiliki

tingkat pendidikan Sarjana ataupun merupakan anggota keluarga aparaturnegara, maka biasanya pendamping PKH akan mensurvey kembali keluarga tersebut.

Tabel 3. Klasifikasi Penerima Bantuan PKH Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
SD	57	57%
SMP	31	31%
SMA	12	12%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan peserta penerima bantuan PKH di Kecamatan Tapian Dolok, mayoritas pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar (SD), yaitu sebanyak 57% (57 orang). Sedangkan distribusi tingkat pendidikan terakhir peserta penerima bantuan PKH yang lain adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu sebesar 31% (31 orang) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sekitar 12% (12 orang). Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan peserta penerima PKH.

Pekerjaan Peserta Penerima Bantuan PKH

Pekerjaan tidak termasuk dalam syarat dan kriteria untuk menjadi peserta penerima bantuan PKH. Dibawah ini adalah beberapa pekerjaan peserta penerima bantuan di Kecamatan Tapian Dolok.

Tabel 4. Klasifikasi Penerima Bantuan PKH Berdasarkan Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	Persentase
Ibu Rumah Tangga	47	47%
Tukang Becak/ Ojek RBT	7	7%
Penjaga Toko	1	1%
Buruh Harian Lepas	7	7%
Tukang Bangunan	8	8%
Wiraswasta	5	5%
Petani	11	11%
Guru Honoror	1	1%
Tidak Bekerja/ Serabutan	13	13%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2023

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar mayoritas peserta penerima bantuan PKH bekerja sebagai ibu rumah tangga yaitu sebesar 47% (47 orang). Hal ini biasa terjadi karena banyaknya komponen anak sekolah, ibu hamil dan ibu yang memiliki balita mendapatkan bantuan PKH, sehingga yang menjadi wali peserta penerima bantuan PKH ini adalah para ibu rumah tangga. Kemudian terdapat juga peserta penerima bantuan PKH yang tidak bekerja yaitu sebanyak 13% (13 orang). Biasanya peserta penerima bantuan PKH yang tidak bekerja ini masuk kedalam komponen Faskes (Fasilitas Kesejahteraan Sosial) dalam kategori Lansia/ Penyandang Disabilitas. Adapun yang bekerja sebagai tukang becak/ojek RBT yaitu sebanyak 7% (7 orang), penjaga toko sebanyak 1% (1 orang), buruh harian lepas sebanyak 7% (7 orang), tukang bangunan sebanyak 8% (8 orang), wiraswasta sebanyak 5% (5 orang), petani sebanyak 11% (11 orang), dan guru honoror sebanyak 1% (1 orang).

Tabel 5. Klasifikasi Penerima Bantuan PKH Berdasarkan Lama Menjadi KPM (Keluarga Penerima Manfaat)

Lama Menjadi KPM	Jumlah	Persentase
0-3 tahun	56	56%

4-5 tahun	27	27%
>5 tahun	17	17%
Total	100	100%

Sumber: Data Diolah, 2023

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa ada peserta penerima bantuan PKH yang sudah menjadi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) lebih dari 5 tahun yaitu sebanyak 17% (17 orang). Hal ini sebenarnya bertolak belakang dengan Peraturan Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). ApabilasesuauidenganPeraturanKementerianSosialRepublik Indonesia, seharusnyausia lama menjadi KPM maksimalhanya 5 tahun, dansudahharusdigantidengan KPM yang baru. Namun karena pengelolaan Program Keluarga Harapan khususnya di Kecamatan Tapian Dolok juga masih berhubungan dengan Perangkat Desa, sehingga masih ada terdapat peserta penerima bantuan PKH yang sudah menerima bantuan lebih dari 5 tahun. Banyak juga peserta penerima bantuan PKH yang lama menjadi KPM nya baru 0-3 tahun yaitu sebanyak 56% (56 orang) dan ada juga yang lama menjadi KPM nya 4-5 tahun yaitu sebanyak 27% (27 orang).

Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan PKH

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program bantuan yang diluncurkan pemerintah pada tahun 2007 yang bertujuan untuk menanggulangi kemiskinan. Sasaran penerima PKH yaitu Rumah Tangga Sangat Miskin (RSTM), sekarang disebut dengan Keluarga Pra-Sejahtera yang memiliki anak usia sekolah, memiliki bayi/balita, ibu hamil/menyusui, memiliki orang tua jompo yang dirawat/lansia, dan penyandang disabilitas. tujuan utama pemberian bantuan PKH yaitu menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama bagi Keluarga Pra-Sejahtera. Program Keluarga Harapan (PKH) dalam rangka menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdasarkan pasal 1 ayat (9) UU No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial mengemukakan bahwa "perlindungan sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial". Oleh karena itu, pemberian bantuan PKH ini diharapkan mampu membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhannya dan mampu meningkatkan kualitas hidupnya dalam rangka memutus rantai kemiskinan. Pada proses pemilihan calon peserta PKH melalui proses yang panjang dan calon peserta PKH setidaknya harus memenuhi salah satu komponen persyaratan sebagai penerima PKH misalnya memiliki anak usia sekolah, memiliki bayi/balita, memiliki orang tua lanjut usia yang dirawat, memiliki seorang anak/orang tua penyandang disabilitas, serta ibu hamil/menyusui.

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tiga komponen bantuan, yaitu bantuan dalam Fasilitas Pendidikan (Fasdik), Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial (Fasos). Penerima bantuan dalam komponen Fasdik, harus memiliki satu anak usia sekolah (SD/SMP/SMA) dalam satu keluarga sebagai salah satu syarat menerima bantuan PKH. Namun dalam kategori fasilitas pendidikan, dalam satu keluarga diperbolehkan mendapat lebih dari satu bantuan PKH, dengan syarat berbeda jenjang pendidikan. Misalnya untuk usia anak Sekolah Dasar (SD) hanya diperbolehkan satu orang dalam satu keluarga, begitupula untuk usia anak Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sedangkan untuk menerima bantuan dalam komponen Faskes (Fasilitas Kesehatan), harus memiliki seorang wanita hamil/nifas dan anak usia dini sebagai syarat untuk menerima bantuan dalam komponen ini. Dan untuk menerima bantuan dalam komponen Fasos, pada satu keluarga harus memiliki seorang lansia (lanjut usia) dan seorang anak/dewasa penyandang disabilitas. Dalam Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki tiga komponen bantuan, yaitu bantuan dalam Fasilitas Pendidikan (Fasdik), Fasilitas Kesehatan (Faskes), dan Fasilitas Kesejahteraan Sosial (Fasos). Penerima bantuan dalam komponen Fasdik, harus memiliki satu anak (SD/SMP/SMA) dalam satu keluarga sebagai salah satu syarat menerima bantuan PKH. Sedangkan untuk menerima bantuan dalam komponen Faskes (Fasilitas Kesehatan), harus memiliki seorang wanita hamil/nifas dan anak usia dini sebagai syarat untuk menerima bantuan dalam komponen ini. Dan untuk menerima bantuan dalam komponen Fasos,

dalam satu keluarga harus memiliki seorang lansia (lanjut usia) dan seorang anak/dewasa penyandang disabilitas.

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen yang mengumpulkan, menggolongkan, mengolah, menganalisis, dan mengkombinasikan informasi keuangan yang relevan untuk pengambilan keputusan pihak-pihak luar seperti pemerintah, masyarakat, investor dan kreditor, pihak-pihak dalam terutama manajemen dan organisasi. Pengawasan adalah fungsi manajemen yang bertujuan untuk mengusahakan agar aktivitas dapat berjalan selaras dengan perancangan yang mengarah pada sasaran yang ditetapkan. Penyimpangan dari rencana dan tujuan merupakan hal yang harus dihindari karena akan menimbulkan penghamburan sumber dana yang pada gilirannya sedikit demi sedikit akan mengikis kemampuan financial organisasi/perusahaan. Bilamana pengikisan itu terus berlanjut tanpa tertanggulangi, sudah dapat dipastikan bahwa organisasi perusahaan bersangkutan tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi. Oleh karena itu, sistem informasi akuntansi yang efektif dalam suatu perusahaan akan memberikan banyak manfaat bagi organisasi/perusahaan yang menjalankannya. Sistem informasi akuntansi yang baik diharapkan dapat menjamin proses penyaluran dana terlaksana dengan baik dan terhindar dari kesalahan atau penyelewengan. Fungsi dari sistem informasi akuntansi terhadap sebuah organisasi adalah untuk mengumpulkan dan menyimpan berbagai macam data mengenai aktivitas dan transaksi dari perusahaan dan kemudian data tersebut diproses menjadi sebuah informasi yang dapat digunakan oleh manajemen dalam mengambil suatu keputusan yang diperlukan. Dalam hal ini Program Keluarga Harapan juga telah menerapkan sistem informasi akuntansi untuk mempermudah proses pengendalian data calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan para peserta penerima bantuan PKH (yang sudah menjadi KPM). Sebelum masuk kedalam proses pengendalian data, tentunya terlebih dahulu para pendamping telah melakukan proses pengumpulan data, pencatatan, verifikasi dan validasi. Aplikasi untuk mengetahui dan mengelola data para calon keluarga penerima manfaat dan para peserta penerima bantuan PKH disebut dengan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Aplikasi DTKS ini dikelola oleh pegawai Kecamatan, dengan begitu para Pendamping PKH harus selalu berkordinasi dengan para petugas Kecamatan, khususnya admin yang mengelola aplikasi DTKS untuk mengetahui keadaan ekonomi masyarakat di satu desa tersebut.

Para Pendamping Sosial PKH saat ini juga dibekali dengan aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation*), Pendamping dapat mengakses daftar masyarakat yang terdaftar dalam DTKS namun hanya dalam cakupan kecamatan wilayah kerja saja, serta hanya memiliki wewenang untuk memverifikasi atau melakukan tugas tertentu khusus kepada KPM PKH sesuai dengan Desa/Kelurahan yang didampingi. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG) merupakan aplikasi nasional untuk penerima segala jenis bantuan pemerintah. Aplikasi ini memuat Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).



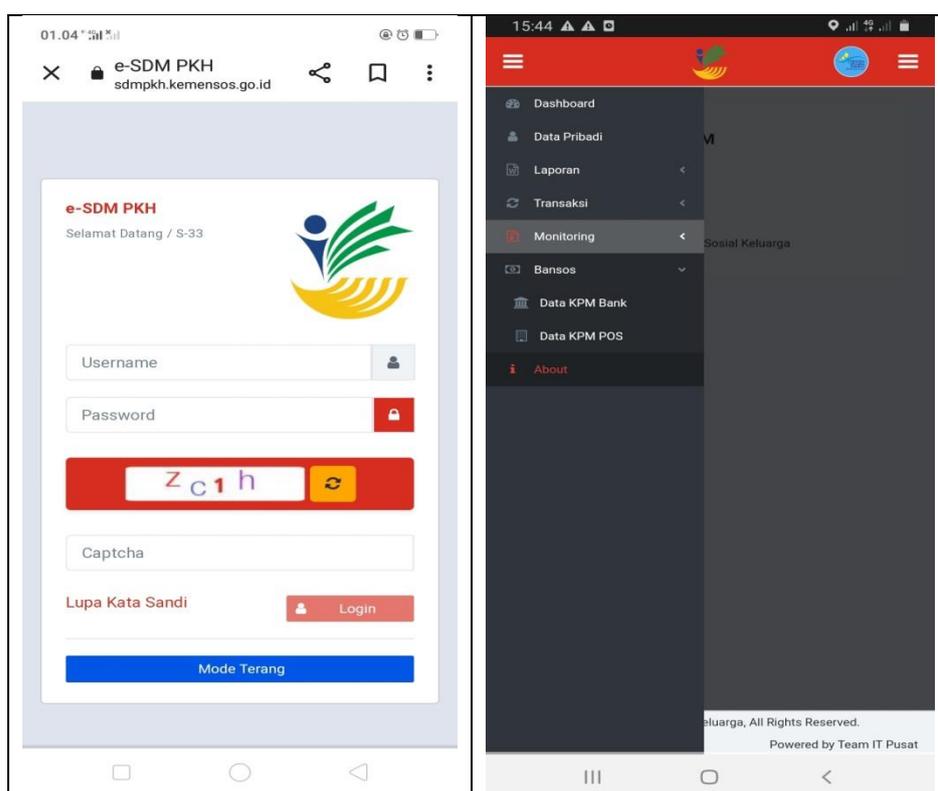
Berikut merupakan tampilan dari beranda aplikasi SIKS-NG, yang dapat mengakses aplikasi ini hanya para Pendamping Sosial PKH. Aplikasi ini membantu para Pendamping PKH untuk mengetahui informasi ataupun kendala seputar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) seperti KPM PKH yang sudah tidak menjadi peserta penerima bantuan PKH namun memiliki masalah pada NIK (Nomor Identitas Kependudukan, Nomor Kartu Keluarga yang tidak terdaftar pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil. Kemudian pada aplikasi ini, para Pendamping PKH juga dapat mengetahui, sudah berapa lama KPM tersebut menjadi peserta penerima bantuan PKH, pendamping juga dapat melihat KPM tersebut menerima penyaluran dana melalui kantor Pos atau Bank Himbara (Bank BRI, Bank BNI, Bank BTN dan Bank Mandiri).

Berikut merupakan tampilan halaman *login* dari aplikasi SIKS-NG. Cara *login* aplikasi SIKS-NG, para pendamping harus memasukkan *username* dan *password*. *Username* berupa NIK Pendamping, sedangkan *password* dibuat sendiri oleh Pendamping PKH, kemudian Pendamping akan memasukkan kode *captcha* yang muncul pada beranda aplikasi SIKS-NG. Dibawah ini merupakan contoh *login* aplikasi SIKS-NG yang dilakukan oleh ibu Nita selaku Pendamping PKH di Kecamatan Tapian Dolok.



Guna memaksimalkan peranan para Pendamping Keluarga Harapan (PKH), pada bulan September tahun 2019 Kementerian Sosial Republik Indonesia juga telah membekali para Pendamping PKH dengan Aplikasi e-SDM PKH. Para Pendamping PKH merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan PKH agar dapat mengatur kegiatan yang dilaksanakan supaya berjalan dengan baik dan mengacu kepada aturan serta kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH). Aplikasi e-SDM PKH memiliki tujuh keunggulan yang dapat mempermudah pekerjaan para Pendamping PKH. Adapun tujuh keunggulan dari aplikasi ini adalah dapat

melakukan proses validasi secara *paperless*, mampu menghitung jenis bantuan sosial secara otomatis, mampu menginput hasil verifikasi secara cepat, melakukan pemutakhiran data dapat dilakukan secara *realtime*, memonitoring pelaksanaan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2) secara berkelanjutan, serta pada aplikasi ini para Pendamping juga dapat melakukan pemantauan perkembangan jumlah KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH yang graduasi (berakhirnya kepesertaan KPM PKH karena kondisi sosial ekonomi yang sudah meningkat dan dikategorikan mampu), dapat melihat atau mengecek data Anggota Rumah Tangga (ART) PKH yang mempunyai prestasi dari tingkat daerah sampai dengan tingkat nasional, dan yang terakhir aplikasi ini juga dapat memantau kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) PKH secara akurat. Kementerian Sosial berharap dengan adanya aplikasi e-SDM PKH, para Pendamping PKH dapat selalu berkomitmen dengan *deadline* pelaksanaan tugas yang telah diberikan dan selalu mengacu pada kualitas akhir yang maksimal. Berikut ini merupakan tampilan halaman *login* dan beranda aplikasi e-SDM PKH.



SIMPULAN

Berdasarkan dengan hasil penelitian observasi dan wawancara di Kecamatan Tapan Dolok peneliti menyimpulkan beberapa hal, yaitu :

1. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), merupakan aplikasi yang membantu Pendamping PKH untuk mengetahui Informasi mengenai tingkat kesejahteraan masyarakat pada satu desa. Aplikasi ini dikelola oleh petugas Kecamatan namun juga dapat diakses oleh para Pendamping PKH melalui ponsel.
2. Aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-*Next Generation* (SIKS-NG) membantu para Pendamping Program Keluarga Harapan dalam pengecekan data para Keluarga Penerima Manfaat. Melalui aplikasi ini para Pendamping PKH dapat mengetahui informasi seputar KPM yang bermasalah pada berkas kelengkapan yang diperlukan untuk pencairan dana bantuan dan juga membantu Pendamping mengetahui KPM tersebut menerima bantuan melalui Bank Himbara atau Kantor Pos.
3. Aplikasi e-SDM PKH juga merupakan sebuah aplikasi yang di *launching* oleh Kementerian Sosial pada bulan September tahun 2019 lalu. Aplikasi ini memiliki banyak keunggulan yang

dapat mempermudah pekerjaan para Pendamping PKH, salah satunya untuk melakukan proses validasi hingga verifikasi para calon KPM. Dengan aplikasi e-SDM PKH ini, Kementerian sosial berharap para Pendamping PKH dapat selalu berkomitmen dengan *deadline* pelaksanaan tugas yang telah diberikan oleh Kementerian Sosial serta mengacu pada kualitas akhir yang baik dan maksimal. Namun sama seperti aplikasi SIKS-NG, aplikasi ini juga hanya dapat diakses oleh para Pendamping PKH saja.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, S., Ludigdo, U., & Mulawarman, A. D. (2017). Pengelolaan Dana Bergulir Pada UPK-G. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*. Vol 6 No 2.
- Anggraeni, Fitria Nur. (2018). "Kesiapan Penggunaan Uang Elektronik Sebagai Fasilitas Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan". *Economy Development Analysis Journal*. ISSN 2502-2725 Volume 6 (1). <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj/article/view/22199>
- Arief, Muhammad & KH, Indrafana, Iman. (2018). "Analisis Pengaruh Sistem Akuntansi Untuk Pelaporan SAK Entitas Menengah Pada Program Peningkatan Penghidupan Masyarakat Komunitas Kota Medan (PPMK Kota Medan)". *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*. 1 (2), 2620-5866. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/LIAB/article/view/2229>.
- Arief, Muhammad. (2013). "Analisis Pengaruh Pemanfaatan Dana Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Kota Medan". *Tesis*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ayu, Gayatri. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.26.2. Februari (2019): 1269-1298
- Azizah, Rufaidah. (2018). "Analisis Sistem Informasi Akuntansi Panyaluran Dana Program Keluarga Harapan Dalam Upaya Meningkatkan Akuntabilitas (Studi Pada Pelaksana Program Keluarga Harapan (PPKH) di Kecamatan Pagelaran)". *Skripsi*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Badan Pusat Statistik. (2016). Bapaks.go.id
- Baridwan, Zaki. (2019). *Sistem Akuntansi Penyusunan Prosedur dan Metode*. Yogyakarta: YKPN.
- Departemen Sosial RI (2013). depsos.go.id
- Dinas Sosial (2021). kemensos.go.id
- Elia, Aningsih, Fitri & Nusa, Yahya. (2021). "Analisis Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Kampung Nawaripi Distrik Wania Kabupaten Mimika". *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset dan Inovasi)*, 5 (1), 2622-0512. <http://www.ejournal.stiejb.ac.id/index.php/jurnal-kritis/article/view/152>.
- Febriyanti, Ayu, Ni Komang, Astara, Wesna, I Wayan & Arthanaya, I Wayan. (2021). "Implementasi Pengaturan Pemberian Bantuan Sosial Dalam Era Pandemi Covid-19 Di Desa Adat Kuta". *Jurnal Preferensi Hukum*, 2 (2), 2746-5039. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum>
- Fitriawati, Nora, Herdiansah, Arief & Gunawan, Adi. (2019). "Sistem Informasi Program Keluarga Harapan Studi Kasus Kecamatan Kosambi Tangerang". *JIKA (Jurnal Informatika)*, 3 (2), 2722-2713. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jika/article/view/2095>.
- Hadi, Sumasno. (2016). "Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi". *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 22 (1). <http://eprints.ulm.ac.id>.
- Hall, James A. (2015). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Handani, Deni, Sari, Mela & Lia, Devi, Ira. (2019). "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Rangka Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Bungo". *Dialektika Publik*, 4 (1). <https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/dialektikapublik/article/view/1347>
- Kemensos RI. (2020). Kementerian Sosial Republik Indonesia. "Buku 3 Petunjuk Pelaksanaan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan". Diakses pada 2022 melalui <https://pkh.kemensos.go.id/dokumen/DOCS20191029023926.pdf>

- Khotimah, Khusnul & Hertati, Diana. (2021). "Evaluasi Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai". *Jurnal Governansi*, 7 (2), 2549-7138. <https://ojs.unida.ac.id/JGS/article/view/4230>.
- Krismiaji. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 3. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. (2015). *Akuntabilitas Birokrasi Publik, Sketsa Pada Masa. Transisi, Magister Administrasi Publik (MAP)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Manopo, D. C. (2017). "Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara)". *Garuda (Garba Rujukan Digital)*, Volume 1 (4). <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/331843>
- Mardiasmo. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Marsela, Selli. (2020). "Sistem Akuntansi Pencairan dan Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi". Skripsi. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Malyunir, Ramawi, Mat.H, Qadarsih, Mariza, Antri. (2021). "Analisis Manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) Di Empat Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat Timur". *Jurnal Administrasi Nusantara Mahasiswa (JAN Maha)*, 5 (3), <https://lppmstianusa.com>.
- Maryanti, Rini, Lisa, Endah & Lestari, Sismaya, Hanisah. (2021). "Analisis Kepuasan Keluarga Penerima Manfaat Program keluarga Harapan (KPM-PKH) Terhadap Penyaluran Bantuan Sosial Beras (BSB) Oleh Perum Bulog Kantor Cabang Cianjur". *JUBIS (Jurnal Administrasi Bisnis)*, 1 (2), 2789-9348. <https://jurnal.unsur.ac.id/jubis/article/view/1936>.
- Mulyadi. (2019). *Sistem Akuntansi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Nandini, Riska, Putri, Rama. Gita, Bimby, Setiawan, Nabilla, Syeikha, Anggraeni Fitriya & Fedryansyah, Muhammad. (2022). "Peran Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Resolusi Konflik Sosial di Desa Genteng Kecamatan Sukasari Kabupaten Sumedang". *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4 (1), 2656-1786. <https://jurnal.unpad.ac.id/jkrk/article/view/38294/17110>.
- Ningsih, Ayu, Messa. (2015). "Respon Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di Desa Landuh Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang". *Skripsi*. Medan. Universitas Sumatera Utara.
- Noor, Munawar. (2014). "Analisis Kelembagaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) Untuk Penanggulangan Kemiskinan". *Jurnal UNTAG Semarang*, 3 (2), 2302-2752. <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/sa/article/view/137>.
- Nordiawan, Deddi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik (Edisi 2)*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nurhafifa, Alya. (2017). "Efektivitas Program Keluarga Harapan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Mabonta Kec. Berau". Skripsi. Palopo. Institute Agama Islam Negeri Palopo
- Pakpahan, Rosmauli, Ratna & Tahitu, Maryona, Febe (2019). "Implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kota Sorong". *Jurnal Akrab Juara*, 4 (4). <https://akrabjuara.com/index.php/akrabjuara/article/view/772>.
- Patel, Amarishkumar. J. (2015). *JIT Implements In Manufacturing Industry – A Review*. ISSN 2091-2730 Volume 3, Issue 4. Gujarat technological University, Gujarat
- Pemprov Jabar. (2016). pemprov.jabar.go.id
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi DT-PFM dan OTM
- Peraturan Menteri Sosial NG omor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 29 Tahun 2014 yaitu tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ([peraturan.Bapakk.go.id](http://peraturan.bapakk.go.id))
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- Rahardjo, Sardiman. (2012). *Media Pendidikan Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*, Depok : Rajawali Pers

- Rahmawati, Fany. (2020). "Akuntabilitas Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan". *Skripsi*. Surakarta: Institute Agama Islam Negeri Surakarta.
- Rep-Tim PKP Kominfo. (2016). Website Resmi Pemerintah Jawa Barat: Program PKH Efektif Kurangi Kemiskinan. Diakses pada 2016 https://jabarprov.go.id/index.php/news/17322/Program_PKH_Efektif_Kurangi_Kemiskinan.
- Romney, Marshall B dan Steinbart, Paul John. (2018). *Sistem Informasi Akuntansi / Accounting Informatin System*. Jakarta : Salemba Empat
- RPJMN 2015-2019
- Sabeni & Ghozali (2014). *Buku Akuntansi Dasar*. PT Gramedia Widia Sarana Indonesia. Jakarta. Grasindo.
- Sari. (2013). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- SK Menteri Sosial Nomor 163/HUK/2017
- SK Menteri Sosial Nomor 57/HUK/2017
- SK Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018
- SK Menteri Sosial Nomor 8/HUK/2019
- SK Menteri Sosial Nomor 133/HUK/2019
- SK Menteri Sosial Nomor 84/HUK/2019
- Subagyo, Rokhmat. (2016). *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : Alim's Publishing.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung : CV. Alfabeta.
- Suparno. (2018). "Analisis Pemberian Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Terhadap Prestasi Belajar Anak di Kecamatan Sipauk". *Jurnal Pekan*, 3 (2), 2540-8038. <http://jurnal.stkipersada.ac.id/jurnal/index.php/PEKAN/article/view/258/253>.
- Susanto, Irwan. (2019). Kementerian Sosial Republik Indonesia: Program Keluarga Harapan "Meraih Keluarga Sejahtera". Diakses pada 2022 melalui <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan(TNP2K)(2016).
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- Weickgenant, A., & Copeland, M. K. (2017). *Accounting Information. Systems Controls and Processes*. Third Edition. Hoboken: John Wiley & Sons. Inc.
- Winarta, Tagel, Wayan, I, Raka, Gede, Agung, Anak & Sumada, Made, I. (2020). "Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial di Pemerintah Kabupaten Gianyar". *Jurnal Administrasi Publik*, 5 (1), 2580-5975. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration/article/view/1906/1476>.
- Yandra, Alexsander, Setiawan, Husni, Sella, Nurmanisa, Prihati, & Derin, Tatum. (2020). "Evaluasi Peogeam Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru". *Jurnal Ilmu Pemerintah*, 19 (2), 168-176. <https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id>.